

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini mengkaji kondisi ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur, yang dipengaruhi oleh faktor – faktor seperti keterjangkauan, ketersediaan, dan pemanfaatan akan pemenuhan kebutuhan pangan. Penelitian ini juga mempertimbangkan variabel moderasi tingkat kemiskinan yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur. Dari hasil pengujian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil pengujian asumsi klasik dalam uji multikolinearitas dan heterokedastisitas ditunjukkan dengan nilai VIF kurang dari 10 dan *Sig. (2-tailed)* > 0.05, yang artinya bahwa model persamaan regresi terbebas dari permasalahan asumsi klasik. Sehingga model regresi yang digunakan sudah tepat dan tidak terjadi bias.
2. Hasil pengujian regresi moderasi (*Moderated Regression Analysis*) menghasilkan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.704 yang berarti dengan adanya variabel moderasi tingkat kemiskinan dapat memperkuat pengaruh indeks ketersediaan pangan, indeks keterjangkauan pangan, dan indeks pemanfaatan pangan secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur sebesar 70.4% sementara 29.6% dijelaskan variabel lain.
3. Hasil uji F regresi moderasi (*Moderated Regression Analysis*) menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0.000 < 0.05$ yang artinya

bahwa indeks ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, dan pemanfaatan pangan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur secara bersamaan diperkuat dengan adanya variabel moderasi tingkat kemiskinan dan variabel interaksinya.

4. Hasil analisis regresi moderasi (*Moderated Regression Analysis*) menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan (MISKN) mampu memperkuat pengaruh indeks ketersediaan pangan (IPs) terhadap pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan koefisien nilai positif dari variabel interaksi IPs*MISKN. Dalam model regresi moderasi, tingkat kemiskinan berperan sebagai quasi moderasi dimana nilai signifikansi variabel interaksi IPs*MISKN sebesar $0.000 < 0.05$. Sementara nilai signifikansi tingkat kemiskinan sebesar $0.003 < 0.05$, sehingga variabel tingkat kemiskinan memiliki peran ganda yaitu sebagai variabel moderasi dan variabel independen yang berpengaruh secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi.
5. Hasil analisis regresi moderasi (*Moderated Regression Analysis*) menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan (MISKN) tidak mampu memoderasi pengaruh indeks keterjangkauan pangan (IPj) terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam model regresi moderasi, tingkat kemiskinan berperan sebagai variabel prediktor dimana nilai signifikansi variabel interaksi IPj*MISKN sebesar $0.657 > 0.05$, yang menunjukkan tidak ada pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.
6. Hasil regresi moderasi (*Moderated Regression Analysis*) menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan (MISKN) mampu memperkuat pengaruh

indeks pemanfaatan pangan (IPm) terhadap pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan koefisien nilai positif dari variabel interaksi IPm*MISKN. Dalam model regresi moderasi, tingkat kemiskinan berperan sebagai quasi moderasi dimana nilai signifikansi variabel interaksi IPm*MISKN sebesar $0.008 < 0.05$. Sementara nilai signifikansi tingkat kemiskinan sebesar $0.003 < 0.05$, sehingga variabel tingkat kemiskinan memiliki peran ganda yaitu sebagai variabel moderasi dan variabel independen yang berpengaruh secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis, berikut beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk optimalisasi pengaruh ketahanan pangan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur:

1. Dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar akan pangan, sebagian masyarakat masih bergantung dengan adanya bantuan dari pemerintah terutama masyarakat dengan kondisi perekonomian dibawah garis kemiskinan. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Jawa Timur tidak hanya memberikan bantuan, tetapi juga perlu mendorong pembangunan ekonomi lokal melalui program pemberdayaan seperti pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, dan pendampingan bisnis bagi masyarakat di daerah – daerah pedesaan dan perkotaan yang rentan terhadap kemiskinan sehingga dapat menciptakan kemandirian pangan pada rumah tangga. Selain itu, untuk program bantuan pangan terhadap masyarakat miskin perlu

dilakukan monitoring dan evaluasi agar manfaat dari program dapat diterima oleh masyarakat yang benar – benar membutuhkan bantuan. Dalam pelaksanaannya pemerintah dapat melibatkan sektor swasta dan organisasi masyarakat sipil dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan dan mengurangi kemiskinan melalui kemitraan untuk pengembangan usaha mikro dan kecil, serta program pelatihan keterampilan.

2. Terkait perbaikan kondisi wilayah dengan kerentanan pangan di Provinsi Jawa Timur, pemerintah dapat mengacu pada pemetaan wilayah dengan skala prioritas untuk bisa menjaga stabilitas pangan baik dari segi harga maupun pasokan pangan yang memadai. Selain itu, diperlukan pengembangan sistem pengelolaan risiko yang komprehensif termasuk pengelolaan risiko keuangan, risiko pasokan, dan risiko lingkungan untuk menghadapi tantangan yang kompleks dalam ketahanan pangan terutama ketika terjadi situasi darurat atau krisis pangan yang tidak terduga, seperti bencana alam atau gangguan pasokan.
3. Pemerintah dapat membuka peluang bagi investasi dan penelitian pertanian serta adanya inovasi teknologi pertanian yang dapat digunakan oleh kelompok tani untuk meningkatkan produksi pertanian dan ekspansi agribisnis sehingga dapat menciptakan lapangan kerja baru di sektor pertanian dan agroindustri yang berpotensi untuk mengentaskan kemiskinan di daerah – daerah yang sebelumnya rentan terhadap ketidakpastian pangan dan ekonomi. Pendapatan yang

meningkat bagi petani dan pelaku usaha lokal dapat membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat yang lebih luas. Sehingga, dengan adanya optimalisasi sektor pertanian dapat memacu pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.